

KEBUTUHAN PELAYANAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA ALAM DI PROPINSI SUMATERA BARAT

Gunawan

ABSTRACT

Case studies in West Sumatra Province, aims to explore the information about the needs of social services for victims of natural disasters. Data and information were collected by interviews and observation. Results of descriptive analysis of data and information collected, revealed that the public has to know information about neighborhood conditions, which were categorized as natural disaster-prone areas, communities have a habit in the face of natural disasters ranging from the rescue, response emergency, until the recovery period. However, every time a disaster is always high risk and long recovery. Given the Earthquake in West Sumatra is not an incidental event (rare), then the service is not enough Victims limited emergency services, recovery, empowerment and protection, but the social services necessary to improve community preparedness. Activities services to victims of natural disasters can be grouped into 3 periods, namely: short-term; Medium Term; Long Term.

Keywords: Requirements, social services, victims of natural disasters

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang berada di jalur gempa. Catatan dari Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, di negara Indonesia terdapat 28 wilayah yang dinyatakan rawan gempa dan tsunami. Di antaranya Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jateng dan DIY bagian Selatan, Jatim bagian Selatan, Bali, NTB dan NTT. Kemudian Sulut, Sulteng, Sulsel, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak, Yapen dan Fak-Fak di Papua serta Balikpapan Kaltim. Setiap kali terjadi gerak alam (gempa) dapat berdampak atau beresiko mulai dari kerusakan bangunan, kehilangan harta benda sampai dengan korban manusia.

Bencana alam¹ yang terjadi di Sumatera Barat dan berbagai dampak yang ditimbulkan

telah dijadikan sebagai issue mulai dari lingkungan masyarakat lapis bawah hingga perguruan tinggi, pakar, sampai di tingkat DPR dan Kepresidenan, bahkan bencana alam telah dijadikan perhatian bangsa dan negara di dunia yang bersifat kemanusiaan (*humanity*). Setiap kali terjadi bencana alam (seperti di Sumatera Barat) akan mengundang campur tangan masyarakat di dunia, terlebih lagi jika bencana tersebut dinyatakan sebagai *bencana besar*. Kepedulian bangsa-bangsa di dunia ini tercermin dari agenda dunia yang menentukan tahun 2005 – 2015 sebagai Dekade Kesiapsiagaan Masyarakat Untuk Mengurangi Resiko Bencana² baik kehidupan, asset-asset sosial, ekonomi maupun lingkungan terutama di daerah rawan bencana alam³.

Dalam kerangka penanggulangan bencana alam, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat dan masyarakat di dunia antara lain:

- (1) Penyebarluasan informasi tentang bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat media cetak dan elektronika. Kecepatan penyebarluasan informasi ini telah menggugah simpati dunia. Kondisi ini tercermin dari Pembahasan tentang bencana, dampak, dan upaya penanggulangannya di berbagai even mulai dari lingkungan masyarakat lapis bawah, perguruan tinggi, pakar, sampai dengan tingkat DPR dan Kepresidenan bahkan lembaga-lembaga di dunia;
- (2) Penyediaan dana penanggulangan bencana alam (baik melalui anggaran pemerintah maupun penggalangan dana dengan cara konvensional seperti kotak amal di jalanan sampai dengan cara yang paling cepat dengan peralatan elektronik);
- (3) Bantuan logistik, pakaian, dan peralatan untuk tempat tinggal baik dari simpatisan (secara individu) maupun kelembagaan (lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah)
- (4) Pengerahan bantuan tenaga terlatih dari masyarakat, militer, pemerintah sampai dengan tenaga dari lembaga asing
- (5) Operasionalisasi peralatan dapur (untuk pemenuhan kebutuhan dasar minimal) sampai dengan peralatan berat untuk membongkar reruntuhan (pembersihan).

Jika dicermati upaya yang telah dilakukan oleh ketiga elemen (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) sudah relatif banyak. Bantuan berupa pikiran, tenaga, dana, keterampilan, dan barang yang telah dialokasikan untuk penanganan terhadap korban bencana sangat besar. Namun pengalaman yang selalu terjadi setiap terjadi bencana, ketuntasan pelayanan yang diberikan kepada korban bencana masih mengalami berbagai hambatan dan keterlambatan. Setiap kali terjadi bencana besar (seperti dampak Gempa tahun 2009) selalu menyumbang meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Sementara itu dampak gempa yang terjadi pada tahun 2007 di Sumatera Barat masih menyisakan masalah sosial yang cukup besar dan kompleks.

Penanganan bencana alam tidak hanya sekedar penanganan darurat, tetapi perlu pelayanan yang berkesinambungan agar kondisi kehidupan masyarakat dan tata kehidupan bermasyarakat benar-benar pulih. Setiap anggota masyarakat dapat melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari dengan wajar. Orang tua dapat bekerja dan menghasilkan nafkah, anak-anak usia sekolah dapat sekolah lagi dan kehidupan keluarga kembali berjalan normal.

Dalam kerangka pelayanan yang komprehensif terhadap korban bencana alam, maka aspek krusial (persoalan) yang dipandang perlu untuk dikaji adalah apa yang dibutuhkan masyarakat agar resiko bencana dapat diminimalisasi, pelayanan yang diberikan dapat lebih cepat dan tepat sehingga proses pemulihan kondisi kehidupan dan tata kehidupan bermasyarakat lebih cepat. Uraian tersebut di atas mengisyaratkan, bahwa penelitian tentang kebutuhan pelayanan sosial bagi korban bencana alam merupakan salah satu upaya yang penting untuk dilaksanakan.

2. Permasalahan

Secara geologis, sebagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikategorikan sebagai wilayah dinamis dan rawan bencana. Dalam perkembangan sejarah, beberapa kali terjadi gerak alam (gempa) di Indonesia beresiko tinggi terhadap tata kehidupan bermasyarakat dan penghidupan masyarakat, bahkan telah banyak menelan korban manusia. Proses gerak alam yang begitu cepat dan dampak yang ditimbulkan serta sistem penanggulangannya telah dijadikan sebagai *issue* internasional. Dana, tenaga, dan waktu yang telah dialokasikan untuk penanganan terhadap korban bencana sangat besar. Namun, setiap kali terjadi bencana alam selalu beresiko:

- a. Selama proses penyelamatan diri selalu terjadi kepanikan masyarakat, ketika meninggalkan rumah tanpa membawa bekal untuk survival, surat/dokumen untuk perlindungan hukum, ketidakpastian kapan masa pengungsian berakhir dan kehilangan harta benda, pekerjaan, dan ketelantaran pendidikan anak. Kondisi ini

dapat mempersulit proses pemulihan kehidupan keluarga.

- b. Jumlah korban bencana alam cukup besar dan selalu diikuti dengan bertambah besarnya permasalahan sosial dan semakin kompleks, yang berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan ketelantaran.
- c. Pelayanan yang diberikan (baik oleh pemerintah maupun masyarakat) lebih terkonsentrasi pada pelayanan darurat (*emergency response*) dan setiap pengungsian selalu terjadi masalah kekurangan/tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih, toilet dan sanitasi yang berdampak pada meningkatnya penyakit diare akut dan infeksi saluran pernafasan yang melanda pengungsi di lokasi penampungan.

Dari permasalahan tersebut persoalan adalah apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat agar resiko bencana dapat diminimalisasi, pelayanan yang diberikan dapat lebih cepat dan tepat sehingga proses pemulihan kondisi kehidupan dan tata kehidupan bermasyarakat lebih cepat.

3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk untuk memperoleh gambaran tentang gambaran tentang

1. Kondisi Lingkungan Akibat Gempa
2. Kondisi Masyarakat Pasca Bencana alam
3. Pelayanan Bantuan Korban Gempa
4. Pendistribusian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana
5. Faktor yang Berpengaruh dalam Pelayanan

4. Konsep

Bencana dapat dipahami sebagai fenomena/gejala dalam suatu proses peristiwa yang berdampak buruk pada manusia. Dilihat dari sumbernya, bencana dapat disebabkan oleh gerak alam yang seringkali tidak dapat diprediksi datangnya dan tidak dapat

dikendalikan. Sumber lainnya karena kesalahan dan perilaku manusia. Menurut UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang dimaksud dengan bencana:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

Menurut Departemen Sosial (Dit BSKBA, 2003), Bencana Alam sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban manusia, penderitaan, kerugian, kerusakan sarana dan prasarana lingkungan dan ekosistemnya serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Berkaitan dengan uraian di atas ini, issue yang dijadikan bahasan dalam penelitian memfokuskan pada bencana yang disebabkan gerak alam khususnya gempa bumi. Proses terjadinya gempa sangat cepat, bahkan kejadiannya hanya dalam hitungan detik, namun dampak yang ditimbulkan sangat besar dan proses pemulihan cukup panjang.

Menurut Wahyudin Munawir (2006) Bencana alam geologis, khususnya gempa bumi, adalah salah satu fenomena alam yang sulit untuk diprediksi kedatangannya sampai sekarang. Fenomena ini seakan-akan muncul secara mendadak dan tidak teratur kedatangannya. Teknologi modern dalam ilmu geologi dan geofisika (terutama yang terkait dengan kegempaan) memang telah mengalami kemajuan sehingga para pakar ilmu kegempaan mampu memprediksi secara

statistik kapan gempa bumi akan muncul. Namun, lagi-lagi, prediksi tersebut sayangnya sering tidak tepat. Seandainya tepat pun, masih tetap ada *range time* dan *range space* yang terkadang cukup panjang. Ketika usaha-usaha untuk memprediksi kedatangan gempa bumi masih belum menampakkan hasil yang akurat, maka usaha yang paling baik dalam mengantisipasi bencana alam (terutama gempa bumi) adalah dengan mitigasi, yaitu mengurangi kerugian yang akan ditimbulkan oleh bencana alam itu sendiri. Syed Housen Nasr-filsuf Iran yang dikutip Munawir, bahwa satu-satunya kelemahan ilmu pengetahuan adalah ketidak-mampuannya untuk memprediksi kedatangan fenomena alam yang justru berakibat pada kehancuran manusia itu sendiri (<http://www.republika.co.id>).

Dalam kerangka penanggulangan bencana alam, terdapat 4 tahap yang dilaksanakan. Dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial No. 57/BJS/2003 tentang "Pedoman Umum Pelaksanaan Program Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial", ke 4 tahap dimaksud adalah:

1. Kesiapsiagaan dan Mitigasi (*pendataan lokasi, jumlah penduduk, jumlah sarana/prasarana dan potensi alam, penyediaan sarana, bahan pokok dan peralatan dapur umum pada saat tanggap darurat, serta memberikan pelayanan informasi tentang bencana alam, langkah penyelamatan*)
2. Tanggap Darurat Bencana Alam (*Evakuasi korban, distribusi bantuan, rujukan korban yang mengalami luka dan pendataan, identifikasi kebutuhan dan pelayanan social*).
3. Rehabilitasi Bencana Alam (*Aspek fisik-ekonomi, social - psikis, aspek tempat tinggal*).
4. Resosialisasi dan Rujukan Korban Bencana Alam (*Pemberdayaan, koordinasi antar instansi, kemitraan*).

Berdasar dari uraian tersebut di atas, minimal ada 3 aspek yang harus dipahami, yakni karakteristik bencana dan kondisi lingkungan (kerusakan), kondisi masyarakat, pelayanan yang diberikan. Ketiga aspek tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu dasar untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam penanggulangan bencana alam.

5. Metode Penelitian

Kebutuhan pelayanan sosial bagi korban bencana alam merupakan penelitian kasus di Padang dan Pariaman. Data dan informasi yang akan dihimpun, sumber informasi, dan teknik pengumpulan data dapat dilihat pada matrik berikut:

Issue dan data	Sumber informasi	Teknik pengumpulan data
Dampak GempaKondisi Kerusakan Lingkungan dan korban)	Lingkungan permukiman, fasilitas perekonomian,	Observasi dan Dokumentasi
Kondisi Masyarakat Pasca Bencana alam (aktivitas sosial ekonomi masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> • Tokoh masyarakat • pejabat instansi sektoral • relawan • pengajar perguruan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Observasi
Pelayanan Bantuan Korban Gempa	<ul style="list-style-type: none"> • Tokoh masyarakat • pejabat instansi sektoral • relawan • pengajar perguruan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Observasi
Pendistribusian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Tokoh masyarakat • pejabat instansi sektoral • relawan • pengajar perguruan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara • Observasi
Pendukung dan Penghambat penyaluran bantuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tokoh masyarakat • pejabat instansi sektoral • relawan • pengajar perguruan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah: (1) observasi terhadap di lingkungan bencana; (2) Wawancara mendalam kepada beberapa informan (tokoh masyarakat, pejabat instansi sektoral, relawan, pengajar perguruan tinggi); dan (3) Studi Dokumentasi, dengan mempelajari buku dan atau literatur, hasil-hasil penelitian, catatan tertulis dan sebagainya yang relevan dengan tujuan penelitian studi kasus ini.

II. HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Lingkungan

Secara geografis, beberapa wilayah Sumatera Barat merupakan daerah yang *dinamis*, berada dalam wilayah Pacific Ring of Fire (deretan gunung berapi Pasifik), yang bentuknya melengkung dari utara Pulau Sumatera-Jawa-Nusa Tenggara hingga ke Sulawesi Utara. Kepulauan Indonesia juga terletak di pertemuan dua lempeng tektonik dunia dan dipengaruhi oleh 3 gerakan, yaitu Gerakan Sistem Sunda di bagian barat, Gerakan Sistem pinggiran Asia Timur dan Gerakan Sirkum Australia. Struktur tanah berbukit dan bergelombang; serta terdapat banyak gunung berapi yang masih aktif. Kondisi ini menyebabkan Indonesia rentan terhadap letusan gunung berapi dan gempa bumi dan tanah longsor dan potensial jadi bencana. Dari beberapa gerak alam yang berpotensi besar menimbulkan bencana adalah gempa dan tanah longsor. Beberapa jenis gerak alam tersebut telah terjadi berulang kali dan setiap kejadian selalu menimbulkan bencana.

Selama kurun waktu kurang dari tiga tahun di Sumatera Barat telah terjadi dua kali bencana akibat gempa besar yakni: (1) Gempa bumi Sumatera Barat Maret 2007 adalah serangkaian gempa bumi berkekuatan 5,8-6,4 skala Richter yang melanda sejumlah kabupaten di provinsi Sumatra Barat, Indonesia pada 6 Maret 2007 mulai pukul 10:49 WIB. Guncangan gempa terasa hingga ke Singapura dan Malaysia. Sampai tanggal 7 Maret 2007 korban meninggal akibat gempa ini dilaporkan sebanyak 52 orang. Menurut kantor Badan Meteorologi dan Geofisika Padangpanjang pada hari kedua, untuk jumlah gempa yang terjadi mencapai 226 kali. Pada

hari Kamis 8 Maret 2007 sampai tengah hari terjadi 45 kali gempa dengan intensitas antara 3,3 skala Richter hingga 4,2 skala Richter. (<http://id.wikipedia.org/wiki>). Badan Vulkanologi Nasional menyebutkan, bahwa gempa tersebut telah memicu dan meningkatkan aktifitas 3 gunung berapi di Sumatera Barat, yaitu gunung Tandikek, Merapi dan Talang. Khusus untuk Gunung Talang. Aktifitas normal gunung ini biasanya ditandai dengan terdeteksinya 3 - 5 gempa vulkanik kecil setiap hari telah meningkat sebanyak 221 kali gempa vulkanik setelah gempa; dan (2) Gempa yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 berkekuatan 7,6 SR pada Rabu (30/9/2009) pukul 17:16 WIB.

Beberapa bencana yang pernah terjadi sebelumnya antara lain tanah longsor di Bukit Tui tahun 1987 di Padang Panjang dengan menelan korban jiwa sebanyak 130 orang. Di kota Padang, pada tahun 1999 di Bukit Lantiak juga terjadi bencana tanah longsor yang menelan korban jiwa sebanyak 67 orang. Di Malalo Kabupaten Tanah Datar sebanyak 31 orang tertimbun tanah longsor; di Talu Kabupaten Pasaman 21 orang tewas dan hanya 4 orang yang ditemukan; tanah longsor di Kabupaten Pasaman juga menelan korban 43 jiwa dalam 1 bus ALS yang sedang menuju Medan. Ini hanyalah korban jiwa dari bencana yang terjadi di Sumatera Barat, belum lagi korban harta benda dan lahan pertanian, sarana prasarana umum. <http://www.walhi.or.id>.

Bencana alam tahun 2007 DI Sumatera Barat yang masih menyisakan masalah baik fisik maupun psikis, kini telah disusul dengan bencana yang lebih besar pada tahun 2009. Kondisi ini diperparah dengan fenomena tanah longsor yang terjadi di Padang Pariaman. Dampak Gempa tidak hanya pada masyarakat sekitar tetapi juga dirasakan oleh masyarakat luas.

Berbagai fasilitas untuk menunjang aktivitas masyarakat (transportasi, komunikasi, perkantoran dan perekonomian) tidak berfungsi. Sebagai ilustrasi gempa 30 September 2009 telah berakibat pada kerusakan bangunan (rumah, pertokoan, hotel, dan gedung-gedung dan fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi) di beberapa tempat memang relatif

besar. Kerusakan bangunan (runtuh) yang cukup banyak adalah wilayah sekitar Pondok Cina (lebih dari 50%). Jika dicermati, bangunan yang roboh (terutama bangunan yang berada di pinggir jalan termasuk pertokoan) terkesan seperti *tebang pilih*. Fenomena ini dapat diamati di beberapa bangunan yang roboh di beberapa jalan kota Padang. Banyak bangunan dengan konstruksi baja yang roboh, ambles tetapi banyak pula bangunan relatif sederhana tetapi masih berdiri kokoh. Menurut Lubis dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi, bangunan yang roboh adalah bangunan yang berada di jalur gempa, jalur gempa ini digambarkan seperti akar pohon, sehingga bangunan yang tidak berada di akar gempa tersebut kemungkinan terkena dampak lebih kecil.

Gempa yang terjadi di Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009 telah berdampak pada kerusakan lingkungan dan menelan korban cukup banyak. Menurut Satkorlak Sumatera Barat per tanggal 9 Oktober 2009 tercatat sebagai berikut:

- a. Manusia
 1. Meninggal dunia : 805 orang
 2. Luka berat : 891 orang
 3. Luka ringan : 1.365 orang
 4. Orang hilang : 241 orang
 5. Mengungsi : 410 orang
- b. Rumah
 1. Rusak berat : 133.739 buah
 2. Rusak ringan : 60.831 buah
 3. Rusak sedang : 65.429 buah

B. Kondisi Masyarakat

Secara umum, masyarakat telah mengetahui kondisi wilayahnya, bahwa daerah yang mereka tempati adalah daerah yang berada di Zona gempa. Pengetahuan masyarakat tentang kondisi wilayah gempa ini tidak hanya diperoleh dari melalui cerita orang tua dan media Informasi (cetak dan elektronik) tetapi masyarakat telah mengalami beberapa kali gempa. Namun selama ini belum pernah diketahui kapan akan terjadi gempa. Hingga sekarang ini, kapan dan di mana gempa bumi itu akan terjadi masih dipandang sebagai misteri alam.

Masyarakat telah menyadari bahwa Gempa bumi merupakan misteri yang bisa datang kapan dan dimana saja. Dalam kerangka mengantisipasi terjadinya bencana tersebut, masyarakat lebih banyak memandang bencana dengan landasan pendekatan spiritual. Artinya, setiap kali kejadian bencana alam selalu dikaitkan dengan kehendak Tuhan. Bencana merupakan cobaan dan sekaligus peringatan pada manusia agar selalu ingat kepada Sang Pencipta. Berbagai kerugian akibat bencana alam tersebut harus diterima dengan *kepasrahan* dan *ikhlas*. Kondisi ini tercermin dari ungkapan tokoh masyarakat: *waspada se awak, pabanyak bado'a dan basarah diri ka Allah, semoga kito sadonyo dijauhkan dari sagalo bencana...* (kita harus selalu waspada dan banyak berdoa dan berserah diri kepada Allah SWT, semoga kita dijauhkan dari segala bentuk bencana). Secara psikologis, kepasrahan dan keikhlasan masyarakat ini merupakan *modal* yang berpotensi besar untuk pemulihan kondisi ketakutan, trauma, dan stress karena resiko bencana yang dialami cukup besar. Dalam konteks ini, sikap kepasrahan dan keikhlasan tidak semata-mata berarti sebagai suatu perilaku yang apatis dan pasif dari masyarakat⁴.

Pengalaman masyarakat dalam menghadapi bencana alam, masyarakat telah mempunyai *Coping Strategic* untuk mengatasi permasalahan yang selama ini sering terjadi. Menurut Dede Mulyanto (2007), Manusia memahami diri dan lingkungannya melalui berbagai konsep dan jalinan yang diperoleh selama interaksi dengan lingkungannya tersebut, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Kemampuan manusia merekam kesan dan gagasannya dari generasi ke generasi melalui lembaga sosialisasi menjadikan aspek budaya dalam melihat bencana begitu penting, kiranya sedikit sekali tindakan manusia yang tidak mendasarkan pada berbagai kesan dan gagasan yang terlembagakan. Uraian ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang sama, pengalaman sebelumnya akan selalu dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Beberapa catatan penting yang dapat dijadikan sebagai bahan

untuk pertimbangan dalam pelayanan sosial kepada korban bencana alam sebagai berikut:

1. Penyelamatan diri masyarakat.

Dalam kerangka penyelamatan diri dari bencana alam, Sumatera Barat khususnya Padang telah disosialisasi (diperkenalkan) dengan beberapa informasi mulai dari peta penyelamatan diri yang dipasang di beberapa jalan protokol sehingga setiap saat masyarakat dapat melihat dan lebih mengenal lingkungannya dengan baik jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Di daerah ini juga telah dilengkapi dengan Sistem deteksi dini terhadap bencana dan tsunami. Disamping peralatan yang cukup canggih, di lingkungan masyarakat juga telah terbangun sistem penyampaian informasi secara tradisional. Bagi masyarakat yang mengetahui lebih awal tentang bencana tersebut berusaha untuk menyampaikan informasi dengan suara teriakan yang dikenal dengan istilah "Gampoo". Istilah tersebut diteriakkan dengan nada tinggi dan berulang. Persoalannya, apakah sistem informasi yang telah terbangun tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat? Walaupun masyarakat telah cukup memahami kondisi lingkungan yang dikategorikan rentan bencana alam, penunjukan lokasi pengungsian yang dianggap aman, serta pengalaman dalam penyelamatan, namun ketika terjadi gempa mereka masih saja mengalami kepanikan.

Dalam proses penyelamatan, faktor psikologis manusia sangat berpengaruh besar terhadap kecepatan eksekusi tindakannya. Padahal proses bencana begitu cepat bahkan hanya dalam hitungan detik. Seolah-olah masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir tentang apa yang harus dibawa dan kemana tujuannya, dan bagaimana mereka dapat mengakses tempat perlindungan tersebut. Tindakannya lebih banyak mendasarkan pada insting atau naluri. Selama proses penyelamatan diri ini, mereka akan mencari orang terdekat dan paling dikenal.

Beberapa menit setelah gempa berlangsung, banyak masyarakat yang semakin panik ketika mendengar issue akan terjadi Tsunami. Masyarakat sudah berusaha untuk meninggalkan tempat dan berlindung di daerah yang tinggi. Padahal belum ada informasi resmi tentang bencana tersebut dari pemerintah. Dari uraian kondisi masyarakat ini minimal ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan. *Pertama*, informasi ini mengindikasikan *trauma masyarakat* atas peristiwa Tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap gempa yang terjadi di Sumatera Barat. Disamping itu kondisi ini juga merupakan salah satu keberhasilan pemerintah daerah dalam sosialisasi keberadaan Sumatera Barat sebagai daerah yang rawan Tsunami⁵. *Kedua*, informasi ini mengindikasikan, bahwa pengetahuan masyarakat gempa yang berpotensi tsunami masih relatif kurang, sehingga setiap gempa dipandang berpotensi Tsunami. Dalam kerangka menyikapi kondisi masyarakat ini, Wahyu Purnomo, pengajar di Perguruan Tinggi Andalas mengemukakan, bahwa *Penanggulangan bencana alam perlu diperkenalkan kepada masyarakat sejak dini dan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu materi atau mata pelajaran sejak Sekolah Dasar, disamping itu Lembaga yang mempunyai komitmen dalam penanggulangan bencana alam seperti Tagana dan lembaga sosial yang lain seyogyanya tidak hanya bekerja pada waktu setelah ada bencana tetapi selama tidak ada bencana mereka tetap aktif dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat*. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Lubis, bahwa *masyarakat kurang diedukasi tentang Karakteristik Bencana alam yang berada di Sumatera Barat*.

2. Pola pengungsian

Pola pengungsian masyarakat pasca gempa pada tahun 2009 tidak berbeda dengan pola pengungsian pasca gempa tahun 2007⁶. Masyarakat korban

bencana alam tidak tinggal di lokasi (tenda) pengungsian yang telah disediakan baik oleh pemerintah maupun lembaga yang mempunyai komitmen dalam penanggulangan bencana alam. Mereka mendirikan tenda mulai yang paling sederhana (terpal yang diikat diantara pohon, jika hujan terkena tampias) sampai dengan tenda yang menyerupai rumah. Lubis karyawan Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat mengungkapkan, *bahwa masyarakat di lingkungannya telah mendapat tenda bantuan dari Depsos dan didirikan oleh masyarakat di lapangan, tetapi mereka enggan tinggal di tenda tersebut. Mereka masih tetap tinggal di tenda sendiri di dekat rumah.*

Siang hari, mereka tetap beraktivitas seperti biasa (orang tua bekerja, anak pergi ke sekolah). Pada malam hari, mereka memilih tinggal di tenda yang dibangun di sekitar rumahnya. Secara psikologis mereka menentukan lokasi yang dipandang paling aman dan dekat dengan tempat tinggalnya. Salah satu tujuannya adalah agar mereka dapat mengawasi *rumah* (termasuk harta benda). Jika sewaktu-waktu kondisi lingkungannya dipandang relatif aman, mereka akan berusaha kembali kerumah untuk memastikan keselamatan harta bendanya. Bagaimana tingkat kerusakannya. Apakah ada barang/ harta benda yang masih dapat dipergunakan.

3. Kebutuhan Air Minum

Perkembangan teknologi telah berdampak pada pola perilaku konsumsi air baik untuk air minum, memasak dan MCK. Untuk memenuhi kebutuhan air minum dan masak, masyarakat telah menggunakan dan tergantung pada air isi ulang yang dipandang lebih praktis (dengan dispenser dapat siap saji air dingin dan air panas), lebih sehat, sedangkan untuk kebutuhan MCK masyarakat telah banyak yang meninggalkan sumur tadisional (baik sumur timba maupun sumur pantek) digantikan dengan sumur bor (listrik).

Disaat terjadi bencana, masyarakat merasakan kesulitan untuk memperoleh air. Di satu sisi, air minum sulit didapat karena depot air isi ulang mengalami keterlambatan pasokan. Di sisi lain, air yang diambil dari sumur bor tidak berjalan karena listrik padam. Kesulitan air bersih tersebut mulai dirasakan pada hari ke 2 pasca gempa.

Dalam kerangka mengatasi kebutuhan air terutama untuk MCK, masyarakat memanfaatkan air sungai. Sungai dimaksud antara lain sungai Batang Kuranji dan sungai Batang, Lubuk Miturun. Sebagai ilustrasi, Fenomena pemanfaatan air sungai Batang Kuranji tepatnya di bendungan intake PDAM. Aktivitas masyarakat di sungai ini mulai berjalan sejak hari ke 2 pasca gempa. Pada awalnya belum begitu banyak masyarakat masih enggan dan aktivitas mereka mulai pagi dini hari sampai sekitar jam 08.00 dan sore hari menjelang Magrib. Pada hari ke tiga dan empat, jumlah keluarga yang memanfaatkan air sungai sudah mulai banyak dan jam pemanfaatannya semakin panjang (dari dini hari sampai sekitar jam 11.00 masih ramai). Mereka memanfaatkan air sungai tersebut tidak hanya terbatas pada saat mereka berada di sungai, tetapi banyak juga masyarakat yang mengambil air sungai dengan galon, drum kecil untuk kebutuhan rumah tangga yang diangkut dengan mobil pribadi.

Bendungan intake PDAM Sumatera Barat di Sungai Batang Keranji yang biasanya sepi telah berubah ramai. Sekitar 4 sampai 5 jam mereka memanfaatkan air sungai secara bersama. Pada saat yang bersamaan, dapat kita jumpai orang yang sedang mencuci pakaian, mencuci perabot dapur, mencuci sepeda motor, mandi, bahkan buang air besar.

Keramaian di sungai ini juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat *rekreasi/ wisata keluarga*. Bapak, Ibu, anak dan kakek/nenek yang berdatangan di bendungan intake tidak sekedar untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, tetapi

ada juga yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat wisata. Banyak anak yang diberi kesempatan orang tuanya untuk mandi sambil bermain di sungai. Syamsir Burhan (*purnawirawan perwira menengah ABRI*) mengemukakan, *bahwa saya datang ke sini mengambil air, mandi dan sekaligus memomong cucu*. Kebahagiaan anak di sungai ini juga terlihat dari beberapa anak yang protes kepada orang tuanya karena waktu bermain di sungai belum puas. Suasana menjadi semakin semarak ketika di tempat tersebut juga dimanfaatkan untuk aktifitas perekonomian. Pedagang asongan, kaki lima, bahkan warung tenda pun telah menghiasi bibir sungai. Aktivitas masyarakat dalam pemanfaatan air sungai ini menjadi berkurang dan berakhir ketika terik matahari sudah mulai menyengat, terlebih lagi air telah menjadi keruh karena aktivitas penambangan pasir di sungai mulai dilakukan.

4. Kondisi Perekonomian⁷ masyarakat

Gempa sebagai fenomena alam yang terjadi di Sumatera Barat telah berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Terganggunya kegiatan perekonomian masyarakat pasca gempa sempat terganggu hingga hari ke dua pasca gempa. Harga barang kebutuhan pokok sempat melonjak karena biaya transportasi mengalami peningkatan akibat pasokan BBM mengalami kelambatan.

Pada hari ke tiga sudah mulai berjalan cukup ramai, pada umumnya telah mulai berjalan baik (kecuali pertokoan dan pasar yang rusak dan tidak dapat dimanfaatkan seperti Matahari Mall, Pasar Metro), penjaja makanan jajanan malam hari, warung makan. Pada hari ke empat pasca gempa, aktifitas pasar sudah berjalan seperti biasa. Kondisi ini tercermin dari suara (teriakan kha) penjaja dagangan di pasar (buah, pakaian dan lain-lain). Semarak pasar juga dilengkapi kerasnya irama musik (mulai dari irama khas Sumatera Barat sampai dengan musik barat) penjaja kaset

dan CD. Arus lalu lintas di jalan raya sudah mulai tersendat karena sebagian bahu jalan dipergunakan untuk menggelar dagangan dan parkir (mobil dan motor). Dentuman musik diputar di dalam Bis Kota maupun Angkutan Kota untuk menarik penumpang juga menambah semaraknya kota Padang.

Uraian tentang kondisi di atas, sekilas mengindikasikan bahwa seolah tidak pernah terjadi apa-apa atau sesuatu yang mengerikan. Di tengah semaraknya aktifitas perekonomian tersebut, terdapat sekelompok masyarakat (karyawan Matahari) yang berada di halaman. Walaupun perusahaan tidak beraktifitas karena bangunan roboh, mereka sebagai karyawan diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dan pulang. Belum ada keputusan kapan mereka akan bekerja lagi, diberhentikan, dan bagaimana pembayaran gajinya.

5. Kesehatan

Umumnya penyakit yang diderita korban (selain luka fisik selama penyelamatan) adalah ispa dan diare. Ispa karena debu yang bersumber dari pembongkaran reruntuhan saat pencarian korban terlebih lagi di musim kemarau. Diare karena ada keterkaitannya dengan kekurangan ketersediaan air bersih dan tempat yang dipergunakan untuk tidur tidak kurang layak.

C. Pelayanan Bantuan Sosial Kepada Korban Gempa

Dalam kerangka penanggulangan bencana alam Pemerintah Daerah Sumatera Barat telah mempunyai sistem penyampaian informasi peringatan dini yang relatif baik. Khususnya di kota Padang, di daerah pantai telah dipasang alat deteksi dini untuk gempa dan tsunami. Walaupun sosialisasi informasi (dalam bentuk penyuluhan secara vokal di lingkungan masyarakat), namun pemerintah telah mensosialisasikan hasil pemetaan daerah rawan dan aman, arus lalu lintas yang baik untuk penyelamatannya. Kondisi ini tercermin dari beberapa papan peta bencana yang dipasang

di pinggir jalan yang strategis dapat di lihat oleh orang lain.

1. Informasi tentang bencana alam di media massa yang terkonsentrasi pada bangunan yang runtuh total (seperti Ambacang, pasar jaya dan sebagainya) dan tanah longsor di Pariaman telah berdampak pada opini masyarakat bahwa Sumatera Barat khususnya Padang dan Padang Pariaman merupakan kota mati. Padahal, dari 24 Kabupaten/Kota yang berada di Propinsi Sumatera Barat yang terkena dampak Gempa tanggal 30 September 2009 sebanyak 16 Kabupaten/Kota. Namun daerah yang relatif besar kerusakan dan korban jiwa ada lima daerah yakni: Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan kota Padang. Kondisi ini akan berpengaruh pada konsentrasi evakuasi dan bantuan logistik di dua wilayah tersebut.
2. Pelayanan yang diberikan: Sejak hari pertama hingga hari ke sepuluh pasca gempa di Sumatera Barat, hampir dipastikan bahwa orang yang menggunakan jasa penerbangan adalah orang yang mempunyai komitmen terhadap korban bencana alam. Mereka adalah relawan baik yang berasal dari tenaga profesional di bidangnya maupun mereka yang sekedar terdorong nuraninya, masyarakat sumbar yang di perantauan, sampai dengan mereka yang ditugaskan oleh lembaga (baik pemerintah maupun swasta). Komitmen masyarakat luas juga telah didukung oleh pengelola Bandara Internasional Minangkabai (BIM) yang membebaskan biaya airportax sejak tanggal 1 sampai 18 Oktober 2009.
3. Spontanitas masyarakat dalam penanggulangan bencana alam baik dari dalam negeri maupun asing cukup besar. Kondisi ini tercermin dari (1) penggalangan kepedulian masyarakat (pikiran, dana, logistik, dan tenaga) untuk membantu korban bencana alam masih berjalan terus, sementara itu dukungan masyarakat luas yang terhimpun sampai dengan hari ke sepuluh tanggal 9 Sep-

tember sangat melimpah dan masih terus berjalan.

4. Ada hal yang menarik dalam penggalangan kepedulian ini, antara lain penggalangan kepedulian orang rantau yang pulang ke kampung halamannya. Mereka yang pulang ke kampung untuk menyaksikan kondisi keluarga dan lingkungannya, mereka menggalang kepedulian untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang masih belum terjangkau pelayanan.
5. Bantuan pelayanan yang diberikan pada hari pertama sampai hari ke 10 masih bersifat pelayanan darurat (Tanggap Darurat), yakni meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Khususnya bantuan evakuasi masih terkonsentrasi di daerah yang relatif terjangkau. Sedangkan daerah lain yang belum terjangkau masih banyak.
6. Secara umum, masyarakat telah mengetahui kebijakan pemerintah tentang bantuan pelayanan untuk pemulihan bagi korban bencana, tetapi belum mengetahui secara utuh tentang proses dan mekanismenya kepada lembaga apa mereka harus ajukan pengaduan.

D. Pendistribusian Bantuan

1. Pendistribusian bantuan lebih terkonsentrasi pada bantuan logistik yang dilaksanakan melalui dua mekanisme, yakni (1) pendistribusian secara berjenjang yakni pendistribusian bantuan yang terhimpun di Gubernur disalurkan melalui Kota/ Kabupaten, sampai dengan Kecamatan, Desa/Lurah dan seterusnya sampai kepada korban; dan (2) pendistribusian secara langsung kepada pihak korban tanpa melalui mekanisme pelayanan melalui jalur pemerintahan.
2. Bantuan yang diberikan secara langsung ke lokasi korban lebih banyak berasal dari kelembagaan sosial, dunia usaha, orang rantau yang pulang ke daerah tersebut.

3. Dalam kerangka pendistribusian, Peran Departemen Sosial Personil didukung dengan 695 personil Tagana yang dikirim ke Sumatera Barat sebanyak 695 personil antara lain terdiri dari Tagana Sumatera Barat, Kab. Kuansiang (RIAU), Riau, Aceh, Sragen Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banyuasin, Bengkulu, Sumatera Selatan, Depok Babel, Lubuk Linggau, DKI Jakarta, Bandung, DI Yogyakarta.

E. Faktor yang Berpengaruh dalam Pelayanan

Faktor yang berpengaruh dalam pendistribusian bantuan umumnya berawal dari akurasi data, yakni data tentang korban, bantuan logistik, kerusakan alam dan infrastruktur, fasilitas transportasi, tenaga relawan. Beberapa aspek pengaruh yang dapat dikemukakan antara lain:

1. Bantuan yang seharusnya didistribusikan tidak hanya bantuan logistik tetapi termasuk pendistribusian tenaga penanggulangan bencana alam. Namun jumlah bantuan baik logistik maupun tenaga tidak dapat tercover secara keseluruhan. Bantuan logistik dan relawan yang turut membantu korban bencana alam cukup banyak (tidak semua relawan yang datang ke lokasi bencana mendaftarkan diri/lapor secara resmi ke Pemerintah Daerah). Kondisi ini berpengaruh pada pendistribusian logistik dan tenaga relawan ke lokasi bencana secara proporsional. Tentunya kondisi ini akan berpengaruh pada pelayanan korban secara memadai. Sebagai ilustrasi: dalam kerangka optimalisasi pelayanan kesehatan di RSAD sangat membutuhkan tenaga medik, karena ketidak hadirannya tenaga medik yang terkena bencana. Sementara itu, relawan tenaga medik yang masih berdatangan cukup banyak.
2. Kurangnya Koordinasi dari penanganan korban bencana alam. Kondisi ini tercermin dari harian Kompas tanggal 8 Oktober 2009. Peralatan untuk penjangkauan pelayanan yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagai ilustrasi, Asisten operasi komando daerah militer I Bukit Barisan Kol.(Inf)

Binarko mengatakan, bahwa Helikopter TNI kurang dimanfaatkan Pemda untuk menyalurkan bantuan ke lokasi bencana yang terisolasi. Saya sudah menawarkan kepada Gubernur tetapi tak ada Pemda yang minta bantuan padahal kami sediakan gratis. Kepala Biro Bina Sosial Sumbang yang mengkoordinasikan pendistribusian logistik mengatakan, selama TNI tidak meminta pengelola gudang tidak mengirimkan logistik ke pangkalan udara Tabing. TNI yang tahu dimana daerah yang terisolasi. Kami hanya bertugas mengelola penerimaan bantuan. Direktur Tanggap Darurat BNPB Slamet Sugiono mengakui satuan koordinasi pelaksana SATKORLAK Pemprov Sumbang agak terlambat memanfaatkan fasilitas transportasi udara yang disediakan TNI. Jika dicermati, di Sumatera Barat telah mempunyai PROTAB PENANGGULANGAN BENCANA ALAM baik di tingkat Propinsi, Kabupaten/kota, sampai dengan tingkat Kecamatan. Tugas masing-masing instansi yang mempunyai komitmen dalam penanggulangan bencana alam telah diatur dalam Protab dimaksud. Syamsir Burhan yang sering berperan sebagai pelatih dalam simulasi mengemukakan bahwa Setiap lembaga pemerintah yang tergabung dalam satuan penanggulangan bencana alam, masing-masing sudah mempunyai tugas ketika terjadi bencana alam.

3. Keterbatasan sarana transportasi dalam penjangkauan pelayanan di daerah yang relatif terisolir (tidak mudah dijangkau mobil bantuan atau tidak efisien jika menggunakan helikopter), pada dasarnya masih dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua (sepeda motor trail).
4. Ketika listrik padam selama beberapa hari, maka peralatan elektronika tidak berfungsi (termasuk berbagai peralatan komunikasi), sementara penguat suara yang ada di mobil patroli kurang dioptimalkan, sehingga untuk penyebaran informasi kepada masyarakat sekitar, koordinasi, dan pengaturan dan atau penyuluhan kepada masyarakat tidak efektif.

5. Hambatan dalam pendistribusian bantuan yang terbanyak adalah di tingkat kecamatan ke bawah karena kurang tenaga, sementara itu dukungan dari relawan di tingkat lokal masih relatif kurang.
6. Banyak bantuan logistik yang distribusikan secara langsung oleh masyarakat luas tetapi tidak terdaftar atau tercatat di Pemerintahan. Kondisi ini akan berpengaruh pada pendistribusian bantuan secara proporsional. Di satu tempat bantuan bisa berlebih (melimpah) sedangkan di tempat lain sangat minim bahkan kurang *terjamah*. Menurut Nuri Muhammad, orang Padang Pariaman yang merantau/tinggal di daerah Ciledug Jakarta. Bantuan yang terhimpun sampai dengan hari ke sepuluh tanggal 9 September sangat melimpah, tetapi hingga saat ini masih terkonsentrasi di daerah yang relatif terjangkau. Sedangkan daerah lain (seperti di Pariaman) yang belum terjangkau masih banyak. Bantuan di lokasi tersebut banyak yang berasal dari orang rantau yang pulang ke daerah tersebut dan kapasitas bantuan tersebut sangat terbatas.
7. Bantuan yang telah didistribusikan kepada masyarakat sudah cukup banyak, namun pendistribusian bantuan masih belum sebanding dengan jumlah bantuan yang terhimpun, sehingga banyak barang yang menumpuk di posko. Jika dicermati, berbagai lembaga yang tergabung dalam satuan tugas penanggulangan bencana alam sudah sangat banyak. Kegiatan penanggulangan bencana yang dipusatkan di kantor Gubernur beraktifitas 24 jam per hari. Kondisi ini dapat dilihat dari aktifitas pekerjaan yang membutuhkan tenaga (penurunan paket makanan) dari Truk ke tempat penampungan. Mereka masih bekerja hingga larut malam (jam 24.00). Pada tingkat manajemen pendistribusiannya (pendataan, perencanaan penyaluran, pengaturan orang). Sementara itu dukungan dari (partisipasi) masyarakat dalam penyaluran bantuan relatif kecil.

III. REKOMENDASI

- A. Mengingat bahwa bencana alam (Gempa Bumi) di Sumatera Barat bukan kejadian yang insidental (langka), maka pelayanan kepada Korban Bencana tidak cukup hanya sebatas pelayanan darurat (*rescue*), pemulihan (*recovery*), pemberdayaan (*empowerment*) dan perlindungan (*protection*), tetapi perlu dilakukan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kegiatan pelayanan bagi korban bencana alam dapat dikelompokkan dalam 3 periode, yakni: jangka pendek; Jangka Menengah; Jangka Panjang. Berdasarkan hasil penelitian, maka kebutuhan pelayanan yang diperlukan sebagai berikut:

1. Jangka Pendek

Pelayanan jangka pendek merupakan pelayanan yang diberikan dalam jangka waktu pendek (1 bulan). Pelayanan diberikan dalam kerangka penyelamatan korban (*evakuasi*), pendataan korban, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar minimal (*pangan, sandang, tempat tinggal, dan kesehatan*), serta bantuan peralatan untuk kebersihan lingkungan.

2. Jangka Menengah

Pelayanan jangka menengah: merupakan pelayanan untuk pemulihan korban yang mengalami hambatan dalam jangka waktu satu tahun. Pelayanan yang diberikan meliputi:

a. Bantuan perlindungan sosial

Bantuan perlindungan sosial merupakan hak bagi setiap masyarakat. Bantuan dimaksud meliputi hak sipil/beberapa aspek legalitas kependudukan yang lain. Kemudahan untuk mengakses layanan publik seperti KTP, Surat Keterangan identitas diri

b. Bantuan Pemulihan

Bantuan pemulihan ditujukan untuk membantu keluarga korban agar secepat mungkin dapat kembali hidup normal. Bantuan yang diperlukan

adalah: peralatan dapur, peralatan tidur, peralatan sekolah, bahan perbaikan rumah dan modal usaha. Kelompok penduduk yang membutuhkan pelayanan adalah kelompok penduduk yang paling menderita secara sosial ekonomi, termasuk pada kelompok ini adalah keluarga yang sebelum bencana merupakan keluarga yang sangat miskin dan miskin, serta keluarga lain yang menderita kerugian besar.

3. Jangka Panjang.

Pelayanan jangka panjang dalam konteks ini adalah pelayanan yang dilaksanakan selama 5 tahun. Tujuan pelayanan jangka panjang adalah untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan penanggulangannya. Dalam konteks ini adalah kesiapsiagaan masyarakat selama tidak ada bencana, masa tanggap darurat, dan masa rehabilitasi/pemulihan.

- a. Pembentukan, Pelatihan dan Legitimasi tenaga tanggap bencana yang berasal dari daerah yang telah terbentuk.
- b. Penyuluhan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana
- c. Penyadaran masyarakat untuk peduli lingkungan.

B. Dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap korban pasca bencana dimaksud ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Aspek-aspek dimaksud adalah:

1. Pelayanan yang dilakukan oleh Direktorat Bencana Alam, Dirjen Bantuan Jaminan Sosial, perlu berkoordinasi dengan direktorat lain yang berada di lingkungan Departemen Sosial dalam memberikan pelayanan pemberdayaan keluarga, perlindungan anak (pendidikan, pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat). Kegiatan dilakukan secara simultan mulai dari

pendataan terhadap masing-masing pelayanan sesuai dengan konsentrasi permasalahannya

2. Bantuan dana yang diberikan baik untuk perbaikan perumahan maupun modal bagi masyarakat tidak bersifat hibah/karitatif. Karena bantuan seperti ini akan menjadikan ketergantungan masyarakat, dan tidak membangun meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Setiap terjadi bencana, masyarakat akan selalu menuntut untuk memperoleh pelayanan tersebut.

3. Masyarakat merupakan unsur penting dalam operasionalisasi pelayanan terhadap korban bencana alam, mulai saat evakuasi sampai dengan masa pemulihan. Sebagai *stake holder* masyarakat perlu diikutsertakan dalam penentuan jumlah korban yang harus dilayani, keragaman dari jenis pelayanan yang dibutuhkan, berapa besar bantuan yang dibutuhkan dan mekanisme pelayanannya.

4. Dalam kerangka optimalisasi pendistribusian bantuan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Aspek dimaksud antara lain:

- a. Penjangkauan daerah yang relatif terisolir (tidak mudah dijangkau mobil bantuan atau tidak efisien jika menggunakan helikopter) di tingkat kecamatan perlu didukung dengan kendaraan roda dua
- b. Efektifitas penyaluran bantuan di tingkat masyarakat perlu didukung dengan sarana komunikasi/peralatan pengeras suara.
- c. Perlu tenaga relawan di tingkat lokal (RT/RW) untuk penyalurannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dede Mulyanto, 2007. Kerangka sosiologis memahami Dampak Bencana Alam terhadap Usaha kecil dalam Jurnal Analisis Sosial Vol 12 Vol 1 Maret 2007..
- Gunawan dkk., 2007. Pemberdayaan Sosial Keluarga Pasca Bencana Alam, Studi tentang Kondisi Sosial Masyarakat dalam Management Bencana, Departemen Sosial RI, Badan Pendidikan dan Penelitian Sosial Kesejahteraan Sosial, Puslitbang Kesos. Jakarta.
- Delliarnov, 2009., Ekonomi Politik, Erlangga Jakarta.
- Rakhmat Jalaludin, 1999., *Rekayasa Sosial, Reformasi atau Revolusi*, Remaja Rosda Kaya, Bandung
- http://www.walhi.or.id/kampanye/bencana/040710_manjibencn_li/
- <http://www.walhi.or.id>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_gempa_bumi_besar_di_Indonesia
- <http://www.republika.co.id>

CATATAN KAKI:

- ¹ Anderson 2004 (dalam Mulyanto Dede; 2007) mengemukakan, kajian sosial atas bencana, paling tidak ada 4 pendekatan. Walaupun dari 4 pendekatan ini masing-masing mempunyai kekhususan dan perbedaan cakupan masalah, namun secara prinsip, masing-masing pendekatan mempunyai keterkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Pendekatan sejarah berkaitan dengan pengumpulan pengetahuan tentang proses perubahan fisik dan sosial yang memunculkan bencana dan proses penyesuaian setelahnya. Pendekatan ekologi politik merupakan perpaduan suatu perpaduan ekologi kultural dan ekonomi politik. Pendekatan praktis atau terapan mementingkan masalah prakiraan, penilaian dan pencegahan bencana. Pendekatan perilaku berkaitan dengan kajian-kajian terhadap persoalan sosial budaya yang tidak secara langsung terkait dengan lingkungan alam.
- ² Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana)
- ³ Dalam kerangka mengurangi resiko bencana, kesiapsiagaan masyarakat di daerah yang rawan bencana alam merupakan salah satu aspek penting dan telah dijadikan tuntutan global dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini diyakini bahwa beberapa wilayah yang dikategorikan rawan seringkali terjadi gerak alam yang tidak dapat dikendalikan dan berpotensi (berresiko) merusak kehidupan manusia. Gunawan dkk (2007), unsur yang terkait dalam penanggulangan bencana alam dapat dikelompokkan dalam tiga besaran yakni: (1) Publik sector (pemerintah: instansi sektoral); (2) Privat sector (dunia usaha, LSM dll); dan (3) Collective action sector (perkumpulan masyarakat). Asumsinya, semakin tinggi kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana alam, maka resiko bencana yang terjadi akan semakin kecil (berbanding terbalik).
- ⁴ Salah satu cara yang bisa dipergunakan untuk menanggulangi masalah individual adalah pendekatan religius. Berikut ini hanya contoh belaka Ketika orang dipecah dari pekerjaannya, kita katakan kepadanya "Anda sedang diuji oleh Tuhan. Hampir semua orang saleh pernah diuji Allah lewat pelbagai musibah. Dan semua ujian ini untuk mengetahui iman Anda. Makin berat ujian yang Anda terima makin tinggi iman Anda. Rakhmat Jalaludin, 1999., *Rekayasa Sosial, Reformasi atau Revolusi*, Remaja Rosda Kaya, Bandung.
- ⁵ Sosialisasi informasi tentang Sumatera Barat sebagai daerah rawan gempa dan Tsunami ini tercermin dari beberapa papan peta yang ditempatkan di jalan jalan Protokol yang dianggap strategis, setiap orang yang lewat jalan tersebut dapat membaca dengan jelas. Dalam Peta terdapat jalur beberapa jalur penyelamatan diri yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah jika terjadi Tsunami

- ⁶ Gunawan dkk., 2007. Pemberdayaan Sosial Keluarga Pasca Bencana Alam, Studi tentang Kondisi Sosial Masyarakat dalam Management Bencana, Departemen Sosial RI, Badan Pendidikan dan Penelitian Sosial Kesejahteraan Sosial, Puslitbang Kesos. Jakarta. Salah satu wilayah yang dijadikan lokasi penelitian adalah kabupaten Solok Sumatera Barat. Tenda yang disediakan oleh Unichef di lapangan (alun-alun) cukup baik dan dapat menampung pengungsi dalam jumlah besar, tetapi banyak diantara tenda tersebut yang kosong.
- ⁷ Dalam bahasa sehari-hari, istilah ekonomi mengandung banyak arti. Hal ini tentu akan berimplikasi terhadap pembahasan mengenai ekonomi itu sendiri. Pertama ada yang memaknai ekonomi sebagai "cara" melakukan sesuatu, seperti "ekonomi" atau "kalkulasi ekonomi" yang konotasinya adalah efisiensi. Kedua, ada yang memaknai ekonomi sebagai "aktifitas" yang biasanya ditunjukkan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Ketiga ada yang melihat ekonomi sebagai "institusi" seperti dalam istilah ekonomi pasar atau ekonomi komando. Caporaso dan Levin (1993) dalam Delliarnov, 2009., *Ekonomi Politik*, Erlangga Jakarta.